

OPTIMALISASI PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Maria Intan Bere Besin

NPP. 30.1144

Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: mariantan1822@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Widodo Sigit Pudjiyanto, S.H., M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the still high prevalence of stunting in several sub-districts in Belu Regency, which indicates that the quality of the population in the health aspect has not been met properly. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and analyze how to optimize the stunting treatment program in Belu Regency, to find out and analyze the driving factors and inhibiting factors in optimizing the stunting treatment program **Method:** This research uses qualitative research methods with an inductive approach according to Optimization Theory from Hotniar Siringorigo. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are that the stunting management program in Belu Regency is focused on several sub-districts where stunting rates are still high. One of the government's efforts to optimize the handling of stunting is the Family Planning program by the Population Control Service. The policies made have yielded good results and the prevalence of stunting can be reduced, and there is availability of health infrastructure facilities, stunting handling staff and cooperation between all parties, both from the government and the community. However, obstacles were also found, namely the lack of awareness and knowledge of mothers, and the need for additional health facilities and staff to handle stunting. **Conclusion:** Optimization of the stunting management program in Belu Regency has been running well and optimally, but still requires improvements to the programs being implemented and participation from all layers across sectors. And it takes an increase in health infrastructure and handling personnel who deal with stunting.

Keywords: Optimization, treatment, program, stunting

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa kecamatan di Kabupaten Belu, yang menunjukkan bahwa kualitas penduduk dalam aspek kesehatan belum terpenuhi dengan baik. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis cara optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dalam optimalisasi program penanganan stunting **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif menurut Teori Optimalisasi dari Hotniar Siringorigo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu program penanganan stunting di Kabupaten Belu difokuskan untuk beberapa kecamatan yang masih tinggi angka stunting. Upaya pemerintah dalam optimalisasi penanganan stunting salah satunya program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk. Kebijakan yang dibuat membuahkan hasil baik dan prevalensi stunting dapat ditekan, serta terdapat ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga penanganan stunting dan adanya kerjasama antar segala pihak, baik dari pemerintah sampai masyarakat. Namun ditemukan juga kendala yaitu kurang kesadaran dan pengetahuan ibu, serta dibutuhkan tambahan fasilitas kesehatan dan tenaga petugas yang menangani stunting. **Kesimpulan:** Optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu sudah berjalan dengan baik dan optimal, namun tetap membutuhkan peningkatan pada program yang dilakukan serta partisipasi dari semua lapisan lintas sektor. Dan dibutuhkan peningkatan sarana prasarana kesehatan dan tenaga penanganan yang menangani stunting.

Kata kunci: Optimalisasi, penanganan, program, stunting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam suatu negara terdapat pemerintahan, dan pemerintahan tersebut dijalankan oleh pemerintah. pemerintah merupakan suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan pelaksanaan (Syafie, 2011). Didalam Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia tahun 1945 pada Alinea ke 4 (empat), didalamnya terdapat tujuan dari negara Indonesia ialah salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini, sama artinya dengan setiap masyarakat di Indonesia memiliki perlindungan hak-hak dasarnya terkait kesejahteraan hidup khususnya mengenai kualitas penduduknya.

Kualitas Penduduk merupakan suatu keadaan dimana penduduk dalam aspek fisik maupun bukan fisik termasuk didalamnya derajat kesehatan. Dengan tingkatan dan kesehatan penduduk yang tinggi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju (Usmaliadanti C, 2011). Kesehatan memiliki peran dan pengaruh yang sangat krusial terhadap kinerja aktivitas penduduknya, sebab kesehatan penduduk yang buruk akan mempengaruhi kualitas penduduknya.

Namun mengenai kualitas penduduk, saat ini anak pendek atau stunting merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, khususnya negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan permasalahan gizi, umumnya ini dikarenakan asupan kebutuhan gizi pada makanan, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi. Laporan Studi Status Gizi (SSGI) mencatat, pada tahun 2021 sebanyak 24,4% atau satu dari empat anak balita Indonesia mengalami stunting. WHO menetapkan angka 20% sebagai batas maksimal toleransi.

Melihat dari angka prevalensi stunting masih melebihi dua puluh persen tersebut menunjukkan pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap percepatan penanganan stunting di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi pertama prevalensi stunting tertinggi diantara sepuluh provinsi dengan angka stunting tertinggi nasional. SSGI mencatat sebanyak 37,8% atau satu dari tiga anak balita di Nusa Tenggara Timur mengalami stunting. Di Indonesia sendiri, di tahun 2021 lokasi persebaran kejadian stunting paling banyak adalah wilayah Nusa Tenggara Timur, namun daerah-daerah lain pun juga masih perlu perhatian dan kepedulian bersama. Karena tingginya masalah stunting yang mempengaruhi kualitas penduduk, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan stunting yang dilakukan secara terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Penyelenggaraan kerangka intervensi dilakukan secara konvergen dengan menyelaraskan

berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting.

Konvergensi dilakukan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai monitor evaluasi. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas). Mengacu pada hasil Riskesdes dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 capaian penurunan stunting di Indonesia sudah melampaui target yang ditetapkan namun diperlukan dorongan yang kuat agar target RPJMN 2020-2024 untuk stunting sebesar 14% dapat tercapai.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan program penanganan stunting berdasarkan data dari SSGI stunting Indonesia ditahun 2021 mencatat NTT angka prevalensi stuntingnya adalah 37,8%. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 22 kabupaten, dan salah satu kabupaten dengan prevensi stunting masih tinggi yaitu Kabupaten Belu. Kabupaten Belu adalah satu dari lima belas kabupaten yang berlabel merah menempati posisi kedelapan dengan prevalensi stunting sebesar 39,9% ditahun 2021. Hal ini menunjukkan prevalensi stunting kabupaten Belu ditahun 2021 tinggi sebab melebihi 30 persen.

Untuk Kabupaten Belu sendiri, dari dua belas kecamatan di Kabupaten Belu terdapat empat kecamatan dengan prevalensi stunting yang masih tinggi melebihi 20% angka yang ditetapkan WHO. meliputi Kecamatan Lamaknen dengan stunting 27,3 (26,15%), kemudian diikuti oleh Kecamatan Lasiolat 25,9%, Kecamatan Lamaknen Selatan 25,1% dan Kecamatan Nanaet Dubesi 21,5%.

Permasalahan ini menunjukkan kualitas penduduk Kabupaten Belu dibidang kesehatan belum terpenuhi secara baik dan perlu adanya perhatian khusus pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah sendiri terkait penanganan dan dibutuhkan cara yang tepat guna terpenuhinya kualitas penduduk bidang kesehatan di Kabupaten Belu terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masalah gizi stunting bukan hanya permasalahan sektor kesehatan saja tetapi merupakan masalah multisektor

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas). Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 capaian penurunan stunting di Indonesia sudah melampaui target yang ditetapkan namun diperlukan upaya penanganan ekstra agar target angka stunting 14% RPJMN 2020-2024 dapat tercapai.

Kemudian dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 menunjuk BKKBN sebagai koordinator pelaksanaan dalam program penanganan stunting. Sebagai regulasi dari Perpres tersebut di Kabupaten Belu sendiri dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Belu. Melihat masih terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Belu dengan angka stunting masih melebihi 20%. Hal ini yang menjadi acuan bagi Kabupaten Belu dan penanganan stunting.

Target Bupati Belu sendiri ialah angka stunting Kabupaten Belu 2023 harus mencapai angka 10%. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu selaku koordinator pelaksana Program Penanganan Stunting di lapangan perlu meningkatkan program penanganan stunting. Namun dari berbagai permasalahan yang ada, maka diperlukan upaya tepat yang dilakukan guna mengoptimalkan program penanganan stunting tercapai secara baik.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik inovasi, terkait penanganan stunting. Nursanti (2021) berjudul Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, menemukan bahwa. Program percepatan penurunan Stunting pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan cukup efektif dilihat dari beberapa indikator yaitu aspek fungsi dan tugas, aspek rencana dan program, aspek ketentuan atau program serta aspek tujuan dan kondisi ideal. Namun dalam program tersebut kurang optimal sebab ada faktor penghambat seperti kurangnya dana, faktor ekonomi, pendidikan orang tua dan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat. Penelitian Samsul Bahri (2021) berjudul Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang menemukan bahwa Strategi penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah cukup optimal serta terevaluasi dibuktikan oleh visi, misi, tujuan, sasaran tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Strategi yang dilakukan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, pendekatan lintas sektor dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan memaksimalkan sosialisasi dalam masyarakat. Penelitian Hayati Sofa Salmon, Donald. K. Moninta, Neni Kumavas (2021) berjudul Strategi Pemerintahan Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe menemukan bahwa Strategi dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 sebagai isu nasional percepatan penurunan stunting. BKKBN yang dalamnya terdapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertugas mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini terkait stunting, perlu adanya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sangihe dan seluruh dinas Lintas sektor terkait pengentasan stunting. Strategi dinilai belum cukup optimal, maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait pengecekan kesehatan di Posyandu sehingga dalam hal penanganan stunting dapat terpenuhinya keberhasilan strategi tersebut

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokasi penelitian yang berbeda dan konteks penelitian yang dilakukan ialah terkait program penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. terkait program penanganan stunting memakai teori Hotniar Siringosiringo memiliki 3 dimensi yaitu Tujuan, Sumber Daya Yang Dibatasi dan Alternatif Keputusan. Dari ketiga penelitian diatas seluruhnya menggunakan metode penelitian yang sama yaitu pendekatan kualitatif, namun memiliki tujuan dan fokus penelitian yang berbeda. Pada Nursanti 2021 fokus yang diambil ialah efektivitas program percepatan penurunan stunting pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Pada penelitian Samsul Bahri 2021 menggunakan fokus penelitiannya yaitu strategi apa yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Pada Hayati Sofa Salmon, Donald. K. Moninta, Neni 2022 tentang strategi BKKBN yang dalamnya terdapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara pemerintah dalam optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat program penanganan stunting di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu dan mengetahui

dan menganalisis berbagai faktor pendukung dan penghambat optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif, metode penelitian ini yang dirancang untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan sesuai dengan sistematika prosedur (Sugiyono, 2018). Peneliti dapat menemukan data yang dapat mendeskripsikan tentang fenomena-fenomena secara faktual, selanjutnya setelah data diperoleh, peneliti melakukan analisa terhadap data-data yang mendeskripsikan fenomena tersebut sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan (Creswell, J.W. 2009). Dengan metode kualitatif pendekatan induktif penulis dapat melakukan pengamatan dan memperoleh gambaran terhadap kejadian yang terjadi dilapangan terkait program penanganan stunting yang dilakukan dalam menangani stunting guna terpenuhinya kualitas penduduk masyarakat kabupaten Belu dalam bidang kesehatan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dians Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dan Masyarakat (6 orang). Adapun teori yang digunakan ialah teori Optimalisasi dari Hotniar Siringoringo (2005). Peneliti menggunakan dimensi Tujuan, Alternatif keputusan dan Sumber Daya Yang Dibatasi untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan program penanganan stunting di Kabupaten Belu dapat berjalan dengan optimal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu, cara pemerintah dalam mengoptimalkan program penanganan stunting serta faktor pendorong dan faktor penghambat yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam sebagai Koordinator penanggung jawab yang menangani percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belu. Program penanganan stunting. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Optimalisasi Program Penanganan Stunting di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur

a) Tujuan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belu lewat program KB bertujuan mengatur kehamilan pasangan usia subur dengan mencegah usia kehamilan yang terlalu dini, jarak kehamilan yang terlalu dekat guna meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan kecukupan gizi anak. Upaya persuasif dan argumentatif, melalui peran bidan atau perawat yang menangani stunting tentang apa itu stunting, penyebab terjadinya stunting kepada masyarakat dan bagaimana pencegahan dan penanganan stunting kepada ibu hamil, Catin dan juga ayah dari ibu hamil lewat sosialisasi dalam masyarakat maupun dialog atau diskusi langsung dengan masyarakat saat ada kegiatan di Puskesmas atau Posyandu. Pemerintah telah memfasilitasi Puskesmas di tiap kecamatan di kabupaten Belu yang mudah diakses baik jarak maupun waktu bagu daerah-daerah pelosok. Kemudian, Tim Pendamping Keluarga dan tenaga kesehatan yang akan mendampingi sekaligus melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Kemudian, masyarakat merasa akses ke Puskesmas menjadi lebih mudah karena jarak ke Puskesmas dekat sehingga biaya transportasinya murah, kontrol kesehatan kandungan dapat dilakukan lebih rutin. **b) Alternatif Keputusan,** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Belu melalui program KB menjadi

melakukan intervensi spesifik seperti mempersiapkan calon ibu semenjak remaja, termasuk menghindari pernikahan beresiko stunting seperti terlalu dini, terlalu muda, terlalu rapat, terlalu banyak, terlalu senja yang dilakukan oleh pasangan usia subur akan membahayakan bagi sang ibu. kemudian, membuka pemahaman masyarakat untuk menjaga dan memperhatikan gizi makanan bagi ibu yang sedang hamil, rutin melakukan kontrol cek kesehatan di Puskesmas guna mengecek kesehatan kandungan. Selain itu, terkait pelayanan kesehatan menurut masyarakat dinilai baik sebab pemerintah menyediakan sarana prasarana kesehatan yang cukup lengkap, dan petugas kesehatan yang siap melayani masyarakat di daerah-daerah pelosok. Serta pemberian makanan tambahan anak untuk memperbaiki gizi anak saat di Posyandu. Adanya program Orang Tua Asuh Stunting untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di beberapa kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Belu yang bertugas mengamati sekaligus memantau anak-anak stunting di wilayahnya. Kemudian, pencegahan melalui penyuluhan bagi ibu muda, remaja supaya mengetahui betapa pentingnya pengetahuan kesehatan agar menjaga pola makan terkait gizi dan nutrisi makanan, serta menjauhi segala hal yang menimbulkan stunting pada anak. c) **Sumber Daya Yang Dibatasi**, Dinas PPKB dalam programnya menawarkan pemberian alat Kontrasepsi bagi keluarga guna menekan angka kelahiran jarak dekat yang berpotensi beresiko stunting. Pemerintah Kabupaten Belu menyediakan sarpras berupa Puskesmas bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan, khususnya untuk penanganan stunting. Tercatat jumlah Kabupaten Belu sampai tahun 2021 memiliki 17 Puskesmas yang terdiri dari tujuh Puskesmas rawat inap dan 10 Puskesmas non rawat inap. Namun tetap dibutuhkan penambahan fasilitas kesehatan maupun perbaikan apabila adanya kerusakan. Disamping itu, saat ini dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 12 kecamatan, sebanyak 168 TPK. Tiap TPK terdiri dari tiga anggota yaitu bidan, Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader KB. Di Kabupaten Belu terdapat 504 anggota TPK ditujukan untuk menjadi tim yang turun langsung dalam penanganan stunting dan juga untuk penanganan stunting agar angka prevalensinya turun di tahun 2023.

3.2 Cara Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu Dalam Optimalisasi Program Penanganan Stunting di Kabupaten Belu

Melalui aksi pengukuran dan publikasi stunting pada anak akan dilihat indikator yang menunjukkan anak beresiko stunting atau tidak. Dengan melakukan pengukuran tinggi dan berat badan (BB/TB), tinggi badan menurut usia (TB/U), dan berat badan menurut Usia (BB/U). Aksi pengukuran dan publikasi ini stunting dilakukan di beberapa Posyandu. Terkait Keluarga Asuh tugasnya ialah kerjasama Dinas Kesehatan mendampingi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjangkau anak-anak di beberapa kelurahan dan desa yang beresiko stunting dan terdampak stunting.

Melalui program Keluarga Asuh ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil mendapatkan 53 anak dari Tiga Kelurahan. OPD bertugas mendampingi anak-anak penderita stunting sehingga sembuh, ataupun kepada anak supaya keluar dari stunting. Dibentuknya Tim Pendampingan Keluarga sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terdapat serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki Calon Pengantin (CATIN) atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, Ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan.

Dilakukan program Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program pemberian program Makanan Tambahan untuk meningkatkan status gizi anak. Jadi anak yang datang di Puskesmas akan diberikan tambahan makanan, seperti makanan dengan gizi dan nutrisi lengkap, bubur kacang hijau, susu, dan makanan lainnya. Kementerian Kesehatan merilis, 725 ribu ibu hamil yang mendapatkan PMT untuk ibu hamil dan balita kurus, Survelians Gizi di daerah kecamatan di Kabupaten Belu untuk Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD).

Upaya dan program penanganan stunting dari tahun ketahun terus dilakukan oleh pemerintah dan hasilnya cukup optimal sebab mengalami angka prevalensi stunting mengalami penurunan. Di Tahun 2021 angka stunting adalah 17,9 persen di tahun 2022 turun menjadi 13,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya dan kebijakan yang dibuat membuahkan hasil. Kemudian pemerintah Kabupaten Belu senantiasa berupaya secara optimal agar angka prevalensi stunting akan terus mengalami penurunan ditahun 2023.

3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Optimalisasi Program Penanganan Stunting di Kabupaten Belu

Penulis melakukan wawancara dengan informan berkaitan dengan faktor pendorong dan faktor penghambat optimalisasi program penanganan stunting. Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan, penulis mengetahui dan menemukan faktor pendorong program penanganan stunting yaitu Program KB yang ditawarkan bagi masyarakat menjadi salah satu kebijakan dan upaya dalam program penanganan stunting. Kb dimaksudkan agar ibu melahirkan bayi normal dan tidak menghasilkan stunting yang baru. Jadi Dinas PPKB menyiapkan calon ibu sehingga tidak ada lagi stunting. Selain itu pendampingan anak baduta supaya tidak sampai stunting.

Kemudian, dengan adanya TPK Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi terbantu sebab adanya ujung tombak dalam mendukung program KB. Tugas Tim Pendamping Keluarga terkait penanganan stunting meliputi melakukan skrining 3 (Tiga) bulan kepada catin, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko stunting mengatasi faktor tersebut. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, pemantauan secara berkala sampai persalinan. Bidan yang menolong persalinan normal, melakukan deteksi dini faktor risiko, mendampingi dan merujuk persalinan dengan risiko pada fasyankes tingkat rujukan. Permasalahan stunting merupakan masalah lintas sektor.

Maka, walaupun Dinas PPKB sebagai koordinator pelaksanaanya, namun dibutuhkan kolaborasi dukungn serta peran pemerintah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Belu, *stakeholder*, serta partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Sebab program penangana stunting akan berhasil dan berjalan dengan optimal. Kendala sekaligus tugas baru bagi Dinas PPKB dan pemerintah ialah terus mendorong percepatan penanganan stunting.

Stunting di Kabupaten Belu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu dari aspek keluarga utamanya Calon Pengantin (Catin) atau pasangan baru yang usianya masih sangat muda, kurang mendapatkan pendampingan istimewa untuk ibu yang sedang hamil. Pentingnya pendampingan bagi calon ibu muda, dan perlu dilakukan pemeriksaan pasca kehamilan maupun setelah melahirkan. Selain itu, selama masa kehamilan, ibu hamil harus rutin melakukan pengecekan kesehatan ibu dan kandungan di Puskesmas.

Ditambah lagi, keluarga juga berperan menyediakan alat transportasi untuk akses ke Puskesmas agar dilakukan kontrol terhadap kehamilan sekaligus mengantarkan saat melakukan persalinan. Kurangnya kesadaran dalam masyarakat terutama keluarga baru, dan ibu hamil yang masih minim pengetahuannya untuk menjaga pola makan. Serta, faktor pendapatan ekonomi yang kecil sehingga tidak mampu menyediakan makanan dan minuman dengan gizi dan nutrisi yang cukup bagi sang ibu guna mencegah beresiko tinggi melahirkan anak dengan resiko stunting.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program penanganan stunting memberikan dampak yang positif dalam masyarakat, terkait penurunan angka prevalensi stunting guna meningkatkan kualitas penduduk dibidang

kesehatan. Program penanganan stunting merupakan salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belu. Penulis menemukan, pendidikan ibu mempengaruhi dalam hal menyediakan makanan dengan gizi dan nutrisi yang baik, hal ini pun ditopang oleh faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan daya beli makanan dengan gizi yang seimbang sehingga nantinya menghambat penanganan stunting. Sama halnya dengan temuan Nursanti bahwa faktor ekonomi mempengaruhi, pendidikan orang tua dan kurang sosialisasi dalam masyarakat adalah salah satu penghambat dari penanganan stunting (Nursanti 2021).

Layaknya temuan Hayati Sofa Salmon, Donald. K. Moninta, Neni Kumavas mengenai strategi BKKBN yang dalamnya terdapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertugas mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat stunting, perlu adanya koordinasi antara pemerintah dan seluruh Dinas Lintas sektor terkait pengentasan stunting. Strategi dinilai belum cukup optimal, maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat terkait pengecekan kesehatan di Posyandu sehingga mendukung keberhasilan strategi tersebut (Hayati Sofa Salmon, Donald. K. Moninta, Neni Kumavas, 2022) Sama halnya dengan penelitian tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memegang andil besar sebagai koordinator pelaksanaan percepatan penanganan stunting perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya melakukan pengecekan kesehatan rutin guna mencegah kelahiran beresiko stunting. Selain itu, kerjasama antar semua lintas sektor pun membantu dalam percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya dalam Samsul Bahri, strategi penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah sasaran tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas. Strategi yang dilakukan, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia (Samsul Bahri, 2021). Walaupun berbeda dinas yang menangani stunting namun sama tujuannya dengan temuan samsul Bahri bahwa pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai dapat memaksimalkan penanganan stunting Layaknya Nursanti yang berbicara mengenai efektivitas program percepatan stunting melalui rencana program yang telah dijalankan (Nursanti, 2021). Program yang tepat dapat menunjang keberhasilan dari upaya penanganan stunting. Penulis menemukan temuan penting yaitu program KB merupakan salah satu program yang cukup optimal dalam menangani stunting, dikarenakan KB menjadikan keluarga khususnya Calon Pengantin (Catin) dan Pasangan Usia Subur sebagai sasaran dari program KB dan sebagai langkah awal pencegahan dan penanganan stunting. KB adalah salah satu cara optimalisasi program penanganan stunting yang merupakan suatu kebijakan dan upaya dari pemerintah khususnya Kabupaten Belu guna menangani dan menuntaskan permasalahan stunting. Percepatan penanganan stunting sendiri merupakan salah satu target pemerintah kabupaten Belu guna meningkatkan kualitas penduduknya dalam bidang kesehatan, dan Belu bebas stunting.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program penanganan stunting di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni masih minimnya pengetahuan dan pendidikan dari ibu terkait, serta dipengaruhi juga dengan keadaan ekonomi. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dan dibutuhkan lagi tenaga kesehatan yang menangani stunting di Kabupaten Belu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi program penanganan stunting di Kabupaten Belu sudah berjalan dengan optimal sebab angka prevalensi stunting mengalami penurunan signifikan. Dipengaruhi upaya pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program penanganan stunting di Kabupaten Belu terdapat faktor pendorong yaitu program KB dan kerjasama antara pemerintah, OPD, adanya kesadaran serta partisipasi masyarakat terkait penanganan

stunting. Faktor penghambat ialah kurangnya pendampingan bagi Calon Pengantin (Catin), Pasangan Usia Subur dan ibu hamil. Selain itu, minimnya pendidikan ibu, kurangnya kesadaran pengecekan kesehatan kandungan saat masa kehamilan, kurang mengonsumsi makanan bergizi dan bernutrisi, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta faktor ekonomi atau pendapatan keluarga.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang begitu cepat selama lebih kurang 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penanganan stunting di Kabupaten Belu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur pertama-tama dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala berkat dan penyertaan-Nya. Terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orang tua tercinta Bapa Yohanes Samalelo Bere Besin dan Mama Libertha Dominatris Mbupu atas segala doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan. Juga untuk orang tua terkasih di Naibonat Bapa Ferdi Nahak dan Mama Ria Bere Besin untuk segala doa, motivasi dan nasihatnya. Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H selaku dosen pembimbing serta semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian, serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Samsul. (2021) Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan laju Penderita Stunting di Kabupaten Enrekang. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Neni. Kumavas, Salmon.S.H, Moninta. K.Donald. (2022) Strategi Pemerintahan Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governence*
- Nursanti. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas STIA Amuntai*
- Usmaliadanti, C. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sekor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009*. Universitas Diponegoro.
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.